

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengeluaran Per Kapita

2.1.1.1. Pengertian Pengeluaran Per Kapita

Menurut Muhamad Abdul Halim (2012 : 47), mendefinisikan pengeluaran per kapita secara keseluruhan bagi anggota rumah tangga yang termasuk dalam satu rumah tangga yaitu dengan memakai pengertian pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi, Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup sehari - hari bagi anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga untuk periode tertentu (BPS, 2016:9).

2.1.1.2. Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita

Penghasilan rumah tangga atau uang masuk itu sebagian besar dibelanjakan lagi, yaitu untuk membeli segala hal yang diperlukan untuk hidup. Dalam ilmu ekonomi dikatakan: dibelanjakan untuk konsumsi. Konsumsi tidak hanya mengenai makanan saja, tetapi mencakup semua pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jumlah pengeluaran suatu rumah tangga tidak selalu sama besarnya, karena dari waktu ke waktu akan berkembang. (Gilarso, 1992 : 63 – 64) Besarnya jumlah

pengeluaran seluruh anggota keluarga tergantung dari banyak faktor seperti:

- a. Besarnya jumlah penghasilan yang masuk
- b. Besarnya keluarga (jumlah anggota keluarga dan umurnya)
- c. Tingkat harga kebutuhan-kebutuhan hidup
- d. Taraf pendidikan keluarga dan status sosialnya
- e. Lingkungan sosial ekonomis keluarga itu (misalnya tinggal di desa, di kota kecil, di kota besar, di Jakarta).
- f. Kebijakan atau ketidak-bijaksanaan dalam mengelola dan mengendalikan keuangan keluarga.

Bahwa dari semua hal tersebut di atas besar kecilnya penghasilan adalah faktor yang terpenting. Makin besar penghasilan keluarga, makin besar pula jumlah pengeluarannya; sebaliknya dari penghasilan yang kecil terpaksa pengeluaran juga akan harus kecil.

2.1.1.3. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa (Rosyidi, 2012 : 163). Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan demikian, untuk mendapatkan asupan konsumsi yang sesuai kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga harus melakukan suatu usaha kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk dibelanjakan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut.

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang baik berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun pembelian, dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain (BPS, 2016 : 9). Fokus pembahasan konsumsinya hanya pada segala apa yang dikonsumsi bagi anggota rumah tangga selain dari pada itu tidak masuk kedalam konsumsi /pengeluaran rumah tangga.

2.1.1.4. Pola Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pendapatan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita. Hubungan keduanya bersifat positif, yaitu apabila pendapatan naik maka tingkat pengeluaran untuk konsumsi masyarakat pun bertambah. (Ibrahim, 2016 : 42) Hubungan keduanya dapat dirumuskan dalam fungsi matematis sebagai berikut:

$$C = a + bY \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, a adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan, b adalah hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi, Y adalah pendapatan disposable (pendapatan yang siap dikonsumsi) (Huda, 2008 : 36).

Dengan kemajuan dalam tingkat penghasilan, pola konsumsi juga berubah. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, apabila pengeluaran-pengeluaran sejumlah keluarga digolong-golongkan menjadi beberapa kelompok, kemudian kita

perbandingan pengeluaran keluarga yang berpenghasilan rendah dengan pengeluaran keluarga yang tergolong cukup kaya. Maka terlihat bahwa terjadi suatu pergeseran dalam pengeluaran untuk konsumsi. Dalam keluarga yang miskin, hampir seluruh penghasilan akan habis untuk kebutuhan primer makanan. Jika tingkat penghasilan suatu keluarga naik maka jumlah pengeluaran uang untuk kebutuhan primer (khususnya makanan) juga akan bertambah banyak. Tetapi jika diperhatikan berapa persen dari penghasilan total yang dikeluarkan untuk berbagai kebutuhan, ternyata bahwa % penghasilan yang dibelanjakan untuk makanan akan berkurang, dari 80% menjadi 70, 60 atau 50%. Sebaliknya % atau bagian penghasilan yang dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain (perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dll.) bertambah besar, dari 20% menjadi 30 sampai 40 atau 50 %. Gejala ini dalam ilmu ekonomi dikenal dengan nama Hukum Engel (Gilarso, 1992 : 64 – 65).

2.1.1.5. Indikator Pengeluaran Per Kapita

1. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah produk barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor produksi ekonomi domestik dan diklasifikasikan berdasarkan golongan rendah, menengah, dan tinggi. Menurut Bramastuti (2009;48) indikator pendapatan antara lain : 1) Penghasilan yang diterima perbulan, 2) Pekerjaan, 3) anggaran biaya sekolah, 4) Beban keluarga yang ditanggung. pemerintah sumberdaya manusia sering disebut sebagai aparat, yaitu pegawai yang melaksanakan tugas-tugas kelembagaan.

2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.1.1.6. Teori Pengeluaran Perkapita

a. Teori Konsumsi

Menurut Sukirno (2000:37) konsumsi dapat diartikan sebagai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga keatas barang – barang akhir dan jasa – jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan tersebut. Keynes mengemukakan teori konsumsi yang fenomenal dan dianggap sebagai sebuah keberhasilan empiris di zamannya. Teori yang dikemukakan oleh Keynes ini berpendapat bahwa bila seseorang mendapatkan tambahan pendapatan, maka secara alamiah, dia akan menambah konsumsi namun besarnya tambahan konsumsi ini tidak akan sebesar tambahan pendapatannya (Mankiw, 2007). Kenaikan pendapatan ini dicerminkan dalam besarnya *Marginal Propensity to Consume* (MPC), dimana besarnya MPC ini diantara 0 sampai 1. MPC sering disebut dengan kecenderungan berkonsumsi masyarakat, yang merupakan persentase dari pendapatan yang digunakan untuk berkonsumsi. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pendapatan, maka akan terjadi kecenderungan kenaikan jumlah konsumsi.

b. Teori Adelman dan Morris

Menurut Adelman dan Morris (dalam Arsyad 2010), Pengeluaran merupakan kegiatan yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan yang tinggi akan berimbas pada pengeluaran yang tinggi pula. Bila pendapatan menurun, maka rumah tangga juga memiliki kecenderungan akan menunda konsumsi. Maka bila diruntut lebih jauh, kenaikan pengeluaran riil mengindikasikan kenaikan pendapatan, sedangkan kenaikan pendapatan riil mengindikasikan kenaikan kesejahteraan. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendapatan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pendapatan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita. Hubungan keduanya bersifat positif, yaitu apabila pendapatan naik maka tingkat pengeluaran untuk konsumsi masyarakat pun bertambah (Ibrahim, 2016 : 42).

2.1.2. Konsep Indeks Pembangunan Manusia**2.1.2.1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Tambunan (2003 : 167) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan sebutan *human development indeks* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan

kualitas dari hasil pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat menggunakan ukuran harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan sebagai ukurannya adalah kombinasi dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita setahun disesuaikan sebagai ukuran.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report* 1991, pembangunan manusia adalah suatu “proses meningkatkan pilihan yang lebih banyak bagi manusia untuk hidup (*a process of increasing people options*) atau proses peningkatan kemampuan manusia (BPS, 2016 : 9).

Pembangunan manusia sendiri adalah suatu konsep yang luas dan menyeluruh yang mearangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi sampai kebebasan demokratis dan kualitas hidup yang sebagian besarnya sulit diterjemahkan ke dalam data statisitik. Walaupun begitu, kita dapat melihat beberarapa indikasi dari data-data yang tersedia dan yang dapat dipergunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu, yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan dalam satu angka tunggal (BPS, Bappenas dan UNDP, 2004 : 10).

(BPS, Bappenas dan UNDP, 2004 : 74) Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen yang utama:

- a. *Produktivitas*. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu

bagian dari jenis pembangunan ekonomi.

- b. *Ekuitas*. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
- c. *Kesinambungan*. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan-fisik, manusia, lingkungan hidup-harus dilengkapi.
- d. *Pemberdayaan*. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu otonom, yang memungkinkan mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dari sini, muncul keberagaman dan spesialisasi sehingga menyuburkan pertukaran (*exchange*) atau transaksi. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia unggulan sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan mondial. Transaksi tidak lain merupakan perwujudan dari interaksi antar manusia dengan segala keberagaman dan kelebihanannya masing-masing, adapun hasil dari transaksi atau interaksi tersebut adalah kesejahteraan social (*social welfare*), sebagaimana ditunjukkan oleh prinsip keunggulan komparatif (*comparative advantage*) (H. Basri, 2002 : 112).

2.1.2.2. Pengukuran Pembangunan Manusia

United National Development Program (UNDP) pada tahun 1990 telah menerbitkan *Human Development Report*. Hal yang menarik dari laporan tersebut adalah penyusunan dan perbaikan *Human Development Index* (HDI). (Subandi, 2014 : 39) Seperti PQLI, HDI mencoba me-*ranking* semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga tingkat 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu:

- a. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan
- c. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap sekitar 160 negara, maka ranking HDI-nya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu (Subandi, 2014 : 40):

- a. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah bila dinilai HDI berkisar antara 0,0 hingga 0,5.
- b. Negara dengan pembangunan manusia menengah bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,78.
- c. Negara dengan pembangunan manusia tinggi bila nilai HDI berkisar antara

0,80 hingga 1,0.

Menurut Faisal Basri dan Haris Munandar, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia seutuhnya telah membuahkan hasil di suatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (*HDI, Human Development Index*). Pada dasarnya HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Namun, HDI juga dipercaya sebagai pengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah terhadap kualitas penduduknya (negara kaya atau berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah-atas, negara berpendapatan menengah-bawah, atau negara miskin alias berpenghasilan rendah).

IPM ini selanjutnya diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia, tentunya dengan melakukan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan data di negara masing-masing.

Dalam konteks Indonesia sendiri, perhitungan IPM meliputi 3 dimensi:

- a. Umur Panjang dan Hidup Sehat, dijabarkan menjadi angka harapan hidup saat lahir, diperoleh dari nominal angka tahunan harapan hidup minimum dan maksimum. Kedua angka standar tersebut masing-masing mencapai 20 tahun dan 85 tahun.
- b. Pengetahuan, dengan dua indikatornya yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah diperoleh dari nominal angka tahunan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Setelah

mendapat HLS selanjutnya dihitung Indeks HLS. Indeks HLS diperoleh dengan membandingkan angka terhadap angka standar UNDP yaitu minimum dan maksimum adalah 0 tahun dan 18 tahun. Sedangkan, Angka rata-rata lama sekolah diperoleh dari nominal angka tahunan dan rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani, dengan asumsi bahwa umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Diperoleh, dengan angka nominal standar UNDP rata-rata lama sekolah dari 0 tahun (tidak/belum pernah sekolah) dan maksimal 15 tahun.

- c. Standar Hidup Layak, dijabarkan menjadi pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dengan rata-rata yang pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari susenas, dibuat konstan dengan menggunakan tahun dasar 2012. Adapun batas minimum dan maksimum yang digunakan untuk penghitungan indeks pengeluaran per kapita setahun disesuaikan dengan masing-masing adalah 1 juta rupiah dan 26,6 juta rupiah.

Indonesia sendiri mempunyai pengukuran klasifikasi yang statusnya telah ditentukan berdasarkan kategorisasi UNDP.(BPS, 2016 : 42) Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan manusia yang rendah bila dinilai HDI berkisar antara 0 hingga 60.
- b. Pembangunan manusia bila nilai HDI berkisar antara 60 hingga 70.
- c. Pembangunan manusia tinggi bila nilai HDI berkisar antara 70 hingga 80.

d. Pembangunan manusia tinggi bila nilai HDI berkisar antara 80 hingga 100.

2.1.2.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Pertama-pertama kita perlu melihat hubungan antara konsep pembangunan manusia dan Indeks Pembangunan Manusia. Konsep pembangunan manusia sangatlah luas-mencakup seluruh aspek kehidupan manusia-dari kebebasan mengungkapkan pendapat sampai kesetaraan jender, lapangan pekerjaan, gizi anak, sampai melek huruf orang dewasa. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia mempunyai lingkup yang lebih sempit. Indeks ini hanya dapat mengukur sebagian saja dari keadaan pembangunan manusia, terutama karena banyak aspek dari kehidupan manusia, seperti kebahagiaan atau hubungan di dalam masyarakat tidak dapat diukur dengan angka. Oleh karena itu, pusat perhatian haruslah diletakan lebih pada konsep daripada indeksinya. Ini berarti dalam setiap aspek pekerjaannya pejabat daerah harus mendahulukan manusia –dengan menganggap manusia bukan sebagai sarana tetapi tujuan. Daripada mencoba mendidik orang dan menjaga kesehatan mereka agar tersedia angkatan kerja yang lebih baik, misalkan saja, atau mencoba meningkatkan kemakmuran ekonomi, lebih baik bila mereka berupaya membantu para bapak, ibu dan anak-anak warga masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih kaya dan membahagiakan. Jadi setiap kegiatan, entah itu investasi dalam membangun jalan, mengeluarkan ijin untuk usaha pembangunan, atau membangun fasilitas-fasilitas kesehatan baru, harus bertujuan untuk memperluas pilihan yang tersedia bagi seluruh warga dan semuanya harus dilaksanakan secara setara dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia memberti petunjuk. Kesenjangan antara indeks terkini dan 100 mencerminkan “kekurangan” pembangunan manusia-jarak yang perlu ditempuh oleh setiap kabupaten. Perbandingan selama beberapa waktu akan memperlihatkan kepada kita kemajuan atau alokasi sumber daya-dan formula yang sekarang ada untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat memang telah memasukan IPM sebagai suatu indikator. Walaupun demikian, penggunaan IPM untuk tujuan- tujuan ini ataupun untuk tujuan-tujuan lainnya perlu dilakukan hati-hati. Jika kekurangan dalam suatu kabupaten adala dua kali lebih besar daripada kabupaten lainnya, maka pembangunan di kabupaten pertama tidak dengan sendirinya harus dua kali lebih besar daripada di kabupaten kedua (BPS, Bappenas dan UNDP, 2004 : 12).

2.1.2.4 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Arsyad (2015 : 46) sejak tahun 1990, *United Nations of Development Program* (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kerja pembangunan manusia atau IPM (*Human Development Indeks*). Nilai IPM diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu :

- a. Tingkat harapan hidup
- b. Tingkat melek huruf
- c. Tingkat pendapatan rill perkapita berdasarkan paritas daya beli

Ketiga unsure tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor – faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan

oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

2.1.3. Hubungan Variabel Antara Pengeluaran per Kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum menurut Adelman dan Morris (dalam Arsyad 2010), Pengeluaran merupakan kegiatan yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan yang tinggi akan berimbas pada pengeluaran yang tinggi pula. Bila pendapatan menurun, maka rumah tangga juga memiliki kecenderungan akan menunda konsumsi. Maka bila diruntut lebih jauh, kenaikan pengeluaran riil mengindikasikan kenaikan pendapatan, sedangkan kenaikan pendapatan riil mengindikasikan kenaikan kesejahteraan. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendapatan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pendapatan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita. Hubungan keduanya bersifat positif, yaitu apabila pendapatan naik maka tingkat pengeluaran untuk konsumsi masyarakat pun bertambah (Ibrahim, 2016 : 42).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Permana, dkk (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi

hubungan yang sangat kuat antara pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dikarenakan berada dalam interval (0,80-1,000).

Chalid (2010) melakukan penelitian tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat Riau. Berdasarkan data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 1990 proporsi pengeluaran konsumsi makanan 65,44% dan bukan makanan 34,56%. Pada tahun 2005 rata-rata proporsi pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan 55,77% dan bukan makanan 44,23%. Secara Agregat berdasarkan PDRB menurut penggunaan tahun 2000 - 2008 proporsi pengeluaran konsumsi makanan berdasar antara 33,60% - 39,86% dan proporsi pengeluaran konsumsi bukan makanan berkisar antara 65,55% - 66,40%. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Riau relatif baik.

Ayu Bhakti (2012) melakukan penelitian tentang Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2008 – 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Namun, APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Yektiningsih (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. Hasil Analisis menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2016 hingga 2017, pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Capaian IPM Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 adalah 65,74 dan

pada tahun 2017 sebesar 66,51 naik sebesar 0,23 point. Nilai IPM Kabupaten Pacitan bila menurut UNDP termasuk kedalam tingkat pembangunan “sedang”. Dengan nilai tersebut IPM Kabupaten Pacitan berada pada peringkat ke-28 dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dan meningkat 1 posisi dari tahun sebelumnya.

Mahaya dan Widowati (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil simulasi numerik, diperoleh bahwa angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yakni sebesar 97,8% dan hanya 2,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

Arofah dan Rohimah (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pengeluaran Riil Per Kapita Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kontribusi Angka Harapan Hidup terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,095 . Besarnya kontribusi Harapan Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,187. Besarnya kontribusi Rata-rata Lama Sekolah Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,280 . Besarnya kontribusi Pengeluaran Riil PerKapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,571. Besarnya kontribusi secara simultan antara Harapan Hidup , Harapan Lama Sekolah , Rata-rata Lama Sekolah , Pengeluaran Riil PerKapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,947 .

Zulyanto (2016) melakukan penelitian tentang Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja untuk pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang berarti bahwa alokasi-alokasi anggaran substansial untuk pendidikan dapat memperbaiki IPM di provinsi Bengkulu. Disisi lain, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur menunjukkan tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif di provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat IPM antara daerah utama dan daerah pemekaran, dimana daerah utama memiliki tingkat IPM yang lebih tinggi daripada daerah pemekaran.

Ezkirianto dan Findi A (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Perkapita di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB per kapita, ketika rata-rata lama sekolah, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, total pengeluaran pemerintah, serta distribusi pendapatan merupakan variabel penting yang menjelaskan kekuatan hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

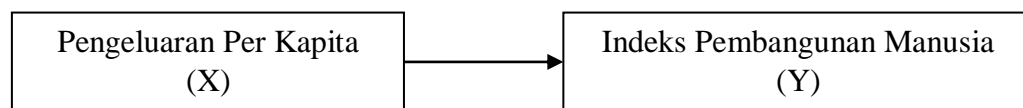
Muda, dkk (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2017. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, indikator kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Azizah Kadri, dkk (2020) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi masing-masing faktor IPM di Papua dengan menggunakan metode GWR. Fungsi pembobotan yang digunakan adalah kernel gaussian adaptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor dominan IPM di Papua, lama sekolah yang diharapkan dan rata-rata lama sekolah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai variabel dari berbagai teori yang dideskripsikan berdasarkan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran pada gambar berikut :



Gambar 2.3.
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian,

serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diteliti oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan (Kuncoro 2013:59).

Hipotesis dalam penelitian adalah diduga pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera periode 2018 – 2021.